

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi

Menurut Edwin Wand dan Gerald W. Brow dalam bukunya *Essensial of Educational of Education* mengemukakan bahwa: *Evaluation refer to act or process to determining the value the something.* “Evaluasi merupakan kegiatan terencana untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Evaluasi merupakan proses pengumpulan data untuk menentukan sejauhmana dalam hal apa dan bagaimana tujuan mudah tercapai.¹

Evaluation is process whice determines the extent to which objectives have been achieved. Artinya “Evaluasi adalah proses yang menentukan kondisi dimana tujuan telah mudah tercapai”. Evaluasi adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program, serta mempmelakukan suatu penelitian.²

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai atau harga tentang sesuatu, termasuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu program, produk, prosedur, serta alternatif strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian evaluasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut di atas memberikan gambaran tentang evaluasi. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut sehubungan dengan penelitian ini, mengartikan penelitian evaluasi adalah suatu usaha

¹ Sulistiyani, 2009, *Evaluasi Pendidikan*, Surabaya: Paramita, h. 50

² Suharsimi Arikunto, 2007, *Program Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Putra, h. 222

untuk mengetahui kinerja suatu program kegiatan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan sistem pencapaian tujuan program kegiatan tersebut.

Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggungjawabkan.³

Anderson memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan. Sementara Stufflebeam mengungkapkan pula bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.⁴

B. Evaluasi Program

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan yang dilaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas.⁵ Program juga didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.⁶

Adapun Evaluasi program didefinisikan sebagai upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan (Cornbach.⁷ Sedangkan pendapat selanjutnya

³ Suharsimi Arikunto, 2007, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Putra, h. 1

⁴ Suharsimi Arikunto, 2007, *Dasar-dasar....*, h.1

⁵ Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Raja, Grafindo Persada : Jakarta, h. 17

⁶ Suharsimi Arikunto & Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Praktisi Pendidikan*. Jakarta:Bumi Aksara, h.4

⁷ Suharsimi Arikunto & Cipi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program* , h.5

mendefinisikan evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program.⁸ Sependapat dengan Wirawan, evaluasi program dapat pula didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.⁹ Adapun pendapat lainnya menegaskan bahwa evaluasi program merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi secara sistematis tentang bagaimana program tersebut berjalan, tentang dampak yang mungkin terjadi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diminati.¹⁰

Evaluasi program adalah proses untuk mendeskripsikan dan menilai suatu program dengan menggunakan kriteria tertentu dengan tujuan untuk membantu merumuskan keputusan, kebijakan yang lebih baik. Pertimbangannya adalah untuk memudahkan evaluator dalam mendeskripsikan dan menilai komponen-komponen yang dinilai, apakah sesuai dengan ketentuan atau tidak.¹¹

C. Fungsi/ Kegunaan Evaluasi

Evaluasi dapat mempunyai dua kegunaan, yaitu fungsi *formatif* dan fungsi *sumatif*. Fungsi *formatif*, evaluasi digunakan untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (Program, orang, produk, dsb.) Fungsi *Sumatif* digunakan untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi Evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan program, perbaikan program,

⁸ Wirawan. 2011. *Evaluasi Teori, ...*, h. 17

⁹ Djudju Sudjana. 2008. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya: Bandung, h.21

¹⁰ Farida Yusuf Tayibnapis. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, h.9

¹¹ Tri Kurniawati R, Suhartono, M. Kholis, 2014, *Evaluasi Program*, Universitas Terbuka, h.iii

pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari pihak yang terlibat.¹²

Micahel Scriven mengemukakan bahwa secara garis besar fungsi penelitian evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yakni:¹³

1. Evaluasi Formatif difungsikan sebagai pengumpulan data pada waktu pendidikan masih berlangsung. Data hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk membentuk (*to form*) dan memodifikasi program kegiatan. Jika pada pertengahan kegiatan sudah diketahui hal-hal apa yang negatif dan para pengambil keputusan sudah dapat menentukan sikap tentang kegiatan yang sedang berlangsung maka terjadinya pemborosan yang mungkin akan terjadi dapat dicegah.
2. Evaluasi Sumatif dilangsungkan jika program kegiatan sudah betul-betul selesai dilaksanakan. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menentukan sejauh mana sesuatu suatu program memiliki nilai kemanfaatan, terutama jika dibandingkan dengan pelaksanaan program-program yang lain. Penilaian sumatif bermanfaat datanya bagi para pendidik yang akan mengadopsi program yang dievaluasi berkenaan dengan hasil, program dan prosedur.

D. Model-model Evaluasi

Terdapat beberapa model evaluasi sebagai strategi atau pedoman kerja pelaksanaan evaluasi program, yaitu:

1. Model Evaluasi CIPP

¹² F.Y Tayipnapi, 1989, *Evaluasi Program*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, h. 3

¹³ Suharsimi Arikunto, 2007, *Dasar-dasar*, h. 222-223

Model CIPP merupakan singkatan (*akronim*) dari *context evaluation*, *input evaluation*, *process evaluation*, dan *product evaluation* yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan kawan-kawannya pada tahun 1968 di Ohio State University dan berorientasi pada pengambilan keputusan.¹⁴

Context evaluation to serve planning decision. Konteks evaluasi ini membantu merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan yang akan dicapai oleh program dan merumuskan tujuan program.¹⁵ Evaluasi konteks memberikan gambaran terhadap latar belakang program yang dievaluasi, mengukur kebutuhan program, menentukan, tujuan, menentukan sasaran program yang akan dicapai. Evaluasi konteks meliputi :¹⁶

a. Analisis masalah/kebutuhan;

Analisis ini berhubungan dengan lingkungan, dengan cara merumuskan antara kesenjangan kondisi yang ada dengan kondisi yang diharapkan.

b. Menggambarkan secara jelas dan terperinci tujuan program yang akan dicapai dengan cara memperkecil kesenjangan antara kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan.

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi konteks merupakan evaluasi terhadap kebutuhan-kebutuhan, tujuan pemenuhan kebutuhan serta karakteristik individu yang melaksanakan evaluasi.

Input evaluation, structuring decision. Evaluasi ini menolong mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan

¹⁴ J. Mbolu, 1995, *Evaluasi Program Konsep Dasar, Pendekatan Model, dan Prosedur Pelaksanaan*, Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas, h. 62

¹⁵ F.Y Tayipnapi, 1989, *Evaluasi.....*, h. 10-11

¹⁶ J. Mbolu, 1995, *Evaluasi...*, h. 62-63

strategi untuk mencapai kebutuhan. Evaluasi ini dipergunakan untuk mengetahui prosedur kerja dalam pencapaiannya.¹⁷ Evaluasi ini sering dipergunakan dalam pelaksanaan program, dengan cara mengadakan penjadwalan dan prosedur pelaksanaannya.¹⁸

Process evaluation, to serve implementing decision. Evaluasi proses dapat menolong dalam melaksanakan implementasi keputusan. Seberapa besar rencana telah diterapkan? Adakah revisi yang harus dilaksanakan? Apabila pertanyaan-pertanyaan itu dapat terjawab, maka prosedur dapat dipantau, dikendalikan dan diperbaiki.¹⁹ Evaluasi proses digunakan untuk menolong dalam menyampaikan dan menyiapkan informasi balikan sehubungan dalam mengimplementasi keputusan, seberapa besar rencana-rencana atau tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan prosedur dan penjadwalan yang ditetapkan.²⁰

Product evaluation, to serve recycling decision. Evaluasi produk digunakan untuk menolong keputusan selanjutnya. Apa hasil yang telah dicapai? Apa yang dilakukan setelah protam berjalan?²¹ Evaluasi produk terdiri atas penentuan dan penilaian dampak umum dan khusus suatu program, mengukur dampak yang terantisipasi, mengidentifikasikan dampak yang tak terantisipasi, memperkirakan kebaikan program serta mengukur efektifitas program. Jenis evaluasi produk digunakan untuk.²²

¹⁷ F.Y. Tayibnapis, 1989, *Evaluasi....*, h. 11

¹⁸ J. Mbulu, 1995, *Evaluasi....*, h. 63

¹⁹ F.Y. Tayipnapis, 1989, *Evaluasi*, h. 11

²⁰ J. Mbulu, 1995, *Evaluasi*, h. 63

²¹ F.Y. Tayipnapis, 1989, *Evaluasi*, h. 11

²² J. Mbolu, 1995, *Evaluasi*, h. 64

- a. Membantu keputusan berikutnya, sejauh mana hasil yang telah dicapai dan program apa yang akan dilakukan setelah kegiatan terlaksana.
- b. Mengukur berhasil tidaknya pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model evaluasi untuk mengambil keputusan merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan suatu program dengan menggunakan model evaluasi CIPP yaitu konteks, input, proses dan produk.

2. Model Evaluasi UCLA

Model evaluasi UCLA kerangka kerjanya hampir sama dengan model evaluasi CIPP. Alkin mendefinisikan Model UCLA sebagai suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dan memilih beberapa alternatif.²³

Lima macam evaluasi menurut Alkin yaitu: *system assesment*, yang memberikan informasi tentang keadaan atau posisi sistem. *System assesment* berfungsi memberikan informasi mengenai keadaan atau profil program. Program *planning*, membantu pilihan program tertentu yang mungkin akan berhasil memenuhi kebutuhan program. Program *Implementation*, yang merupakan informasi apakah program sudah diperkenalkan kepada kelompok tertentu yang tepat seperti yang direncanakan? Program *improvement*, yang memberikan informasi tentang bagaimana program berfungsi, bagaimana program bekerja, atau berjalan? Apakah menuju pencapaian tujuan, adakah hal-hal atau masalah-masalah baru yang tak terduga.²⁴

²³ F. J., Tayibnaxis, 1989, *Evaluasi*, h. 11

²⁴ J. Mbulu, 1995, *Evaluasi*, h. 83

Program *Improvement*, digunakan untuk memberi informasi cara program tersebut dapat dimanfaatkan dan seperti apa program dapat dilaksanakan. Program *certification*, yang memberi informasi tentang nilai atau guna program.²⁵

3. Model Evaluasi Brinkerhoff

Model ini digunakan oleh Brinkerhoff dan kawan-kawan, dengan mengemukakan tiga jenis desain, yaitu:

a. *Fixed vs Emergent Evaluation Design*. Desain *Fixed*, meliputi penentuan, perencanaan secara sistematis dan rancangan yang dikembangkan berdasar pada tujuan program. Rencana analisis dibuat sebelumnya dan yang menggunakan akan menerima informasi seperti yang telah ada dalam tujuan. Strategi pengumpulan informasi dalam desain ini menggunakan test, angket, lembar wawancara.

Tidak seperti desain *fixed*, desain *emergent* dibuat dengan pertimbangan untuk menangkap fenomena yang sedang berlangsung yang berpengaruh terhadap program, contohnya seperti masukan-masukan baru. Pada dasarnya desain ini selalu berkembang sesuai dengan kondisi dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan.

b. *Formative vs Sumative Evaluation*. Evaluasi formatif dipakai dalam rangka memperoleh data bagi keperluan revisi program, sedangkan evaluasi sumatif digunakan untuk menilai kegunaan suatu program. Fokus pada evaluasi sumatif adalah variable-variabel yang dipandang penting dan berhubungan dengan kebutuhan pengambilan keputusan.

²⁵ F.J. , Tayibnapis, 1989, *Evaluasi ...*, h. 11

c. *Experimental Design dan Experimental Quasi vs Natural Inquiry*. Desain ini merupakan hasil adopsi dari disiplin penelitian. Desain eksperimental dan quasi eksperimental digunakan untuk menilai suatu program yang baru diujicobakan. Sementara itu *natural inquiry dilaksanakan* dengan cara evaluator langsung terhadap sumber-sumber informasi serta program yang dilakukan.

d. Model Evaluasi Stake

Model ini digunakan oleh Stake (1967), analisis proses evaluasi yang kembangannya membawa pengaruh yang cukup besar dalam bidang ini dan berhasil memberi dasar yang sederhana tetapi konsep yang cukup kuat dalam perkembangannya yang lebih jauh dalam bidang evaluasi. Stake menitikberatkan terhadap dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu diskripsi (*description*) dan pertimbangan (*judgement*), serta membagi tiga tahap dalam program pendidikan yaitu: *antecedents (input)*, *transaction (process)* dan *Outcomes (output)*.²⁶

Pada tahapan pendahuluan (*antecedents*) berhubungan dengan kondisi yang terlebih dahulu ada sampai pada saat dilakukan instruksi yang dihubungkan dengan hasil yang dicapai. Tahap transaksi (*transactions*) berhubungan dengan proses dilakukannya instruksi dan hasil yang diperoleh adalah berdasarkan pengaruh dari proses tersebut. Tahap *outcomes* berhubungan dengan hasil yang dicapai setelah program diimplementasikan serta untuk mendapatkan langkah kerja selanjutnya.²⁷

Penekanan umum atau hal yang penting dalam model ini ialah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. Stake mengatakan bahwa *description* di satu pihak berbeda dengan *judgement* atau menilai. Dalam

²⁶ F.J. Tayihnapis, 1989, *Evaluasi*, h.11

²⁷ J. Mbulu, 1995, *Evaluasi*, h. 74-75

model ini, *antecedent*, *transaction* dan *outcomes* data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan tujuan dengan keadaan sebenarnya, tetapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut, untuk menilai manfaat program.²⁸

E. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif lahir sebagai bentuk ketidakpuasan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan menggunakan sistem segregasi.²⁹ Sistem ini dipandang bertentangan dengan tujuan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah untuk mempersiapkan mereka untuk berinteraksi sosial secara mandiri di lingkungan masyarakatnya. Namun dalam proses penyelenggaraan pendidikannya, sistem segregasi justru dipisahkan dengan lingkungan masyarakat, khususnya terjadi di masyarakat kita. Berangkat dari kenyataan tersebut, lahirlah beberapa konsep pendidikan inklusif.³⁰

Pendidikan inkusif merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan tertentu dan anak-anak lainnya yang disatukan dengan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang

²⁸ F.J. Tayihnapis, 1989, *Evaluasi*, h. 16-17

²⁹ Segregasi adalah sistem penyelenggaraan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki kelainan atau anak-anak berkebutuhan khusus

³⁰ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 47

seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.³¹

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Direktorat Pembinaan SLB (2007), sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusif memiliki empat karakteristik makna, yaitu:³²

- a. Pendidikan inklusif adalah proses pembelajaran yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keberagaman individu anak.
- b. Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan anak dalam belajar.
- c. Pendidikan inklusif membawa makna bahwa anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi, dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya.
- d. Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, eksklusif, dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang menghargai bahwa manusia:³³

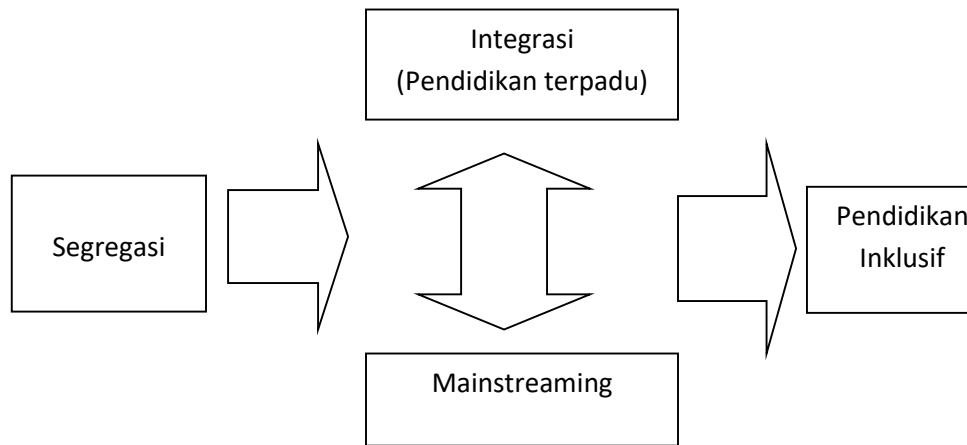
- a. Diciptakan dari makhluk yang berbeda-beda (unik)
- b. Menghargai dan menghormati bahwa semua orang merupakan bagian dari masyarakat
- c. Diciptakan untuk membangun sebuah masyarakat, sehingga sebagai masyarakat normal ditandai dengan adanya keberagaman dari setiap anggota masyarakatnya.

Apabila digambarkan maka perubahan paradigm pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah sebagai berikut:

³¹ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, h. 47

³² Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, h. 48

³³ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar,*, h. 48



Gambar 1.2. Perubahan Paradigma Pendidikan bagi ABK³⁴

2. Filosofi Pendidikan Inklusif

Filosofi pendidikan inklusif sebenarnya hampir sama dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu ketika *founding fathers* menanamkan falsafah keberagaman dalam kehidupan bernegara dan berbangsa tetapi memiliki satu tekad yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memahami benar arti perbedaan dan keberagaman yang terdapat di masyarakat. Hakikatnya adalah bahwa perbedaan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan dari sebuah normalitas, melainkan sebagai sesuatu yang perlu disyukuri. Oleh karena dengan adanya perbedaan, setiap manusia dapat berinteraksi untuk saling melengkapi kekuarungannya. Oleh karena itu, adanya perbedaan di antara manusia tidak harus diperlakukan eksklusif, sebab keanekaragaman pada suatu masyarakat adalah sesuatu yang wajar (“normal”).³⁵

³⁴ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar.....*, h. 49

³⁵ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar.....*h. 42

Pandangan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan dengan menggunakan pendekatan *humanis*. Pandangan ini sangat menghargai manusia sebagai manusia yang sama (*equal*) dan memiliki kesempatan yang sama (*equity*) dengan manusia lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan inklusif sebagai wadah ideal yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua (*education for all*), terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk memperoleh pendidikan layak seperti anak-anak lain.

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkelainan. Pendidikan secara formal ditegaskan dalam pernyataan Salamanca pada konferensi dunia tentang Pendidikan khusus pada tahun 1994 yang menyatakan bahwa "prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah: selama memungkinkan, semua anak seyogyaknya belajar bersama-sama tanpa memadamkan kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka.

3. Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan .³⁶

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar.
- c. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekankan angka tinggal kelas dan putus sekoah.
- d. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran.

³⁶ Direktorat Pembinaan SLB, 2007, *Pedoman Umum Pendidikan Inklusif*, Jakarta: Direktorat Pembinaan SLB, h. 16

- e. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi, “*setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan*”, dan Pasal 2 yang berbunyi “*setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*”. UU nomor 20 tahun 2003 tentang SPN, khususnya Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “*setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu*”, UU Nomor 23 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 51 yang berbunyi, “*anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa*”.

4. Landasan Pendidikan Inklusif

Di dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang dikembangkan, yaitu:³⁷

a. Landasan Filosofis

Secara Filosofis penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang Negara Burung Garuda yang berarti *Bhinneka Tunggal Ika*. Keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa:
 - a) manusia dilahirkan dalam keadaan suci;

³⁷ Direktorat Pembinaan SLB, 2007, *Pedoman*, h. 17

- b) kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik tetapi takwanya;
 - c) Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri;
 - d) manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (“inklusif”)
- 3) Pandangan universal hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.

b. Landasan Yuridis

- 1) UUD 1945 (Amandemen) Pasal 31:
- 2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c. Landasan Empiris

- 1) Permendiknas No. 70 Tahun 2009, Pendidikan Inklusif (PI) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan potensi kecerdasan dan/bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan bersama-sama dengan peserta didik normal pada umumnya.
- 2) Direktorat Pembina PKLK Dikdas (2012) menyebutkan bahwa pendidikan inklusif diberikan kepada semua anak terlepas dari kemampuan ataupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama.
- 3) Direktorat Pembina PKLK Dikdas (2012) bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan inklusif adalah keterlibatan, dimana penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan semua komponen pendidikan terkait.

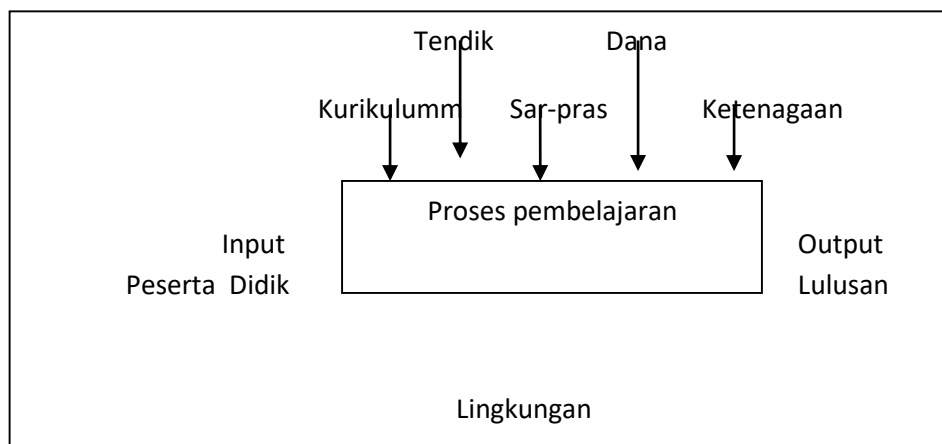
- 4) Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 10 ayat 1, bahwa pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit satu orang GPK pada satuan pendidikan yang ditunjuk menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- 5) Permendiknas No. 70 Tahun 2009 pasal 7 yang menyebutkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan ABK sesuai minat, bakat dan potensi.
- 6) Direktorat Pembina PKLK (2012) bahwa di dalam pendidikan inklusif, salah satu prinsip pembelajarannya adalah prinsip individual.
- 7) Konvensi Hak Anak, 1989 (*Convention on the Rights of the Child*).
- 8) Konferensi Dunia tentang Pendidikan Untuk Semua, 1990 (*World Conference on Education for All*).
- 9) Resolusi PBB No 48 Tahun 96 tahun 1993 tentang Persamaan Kesempatan bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for persons with disabilities*).
- 10) Pernyataan Salamanca tentang Pendidikan Inklusif, 1994 (*The Salamanca Statement on inclusive Education*).
- 11) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan untuk Semua, 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*).
- 12) Deklarasi Bandung (2004) dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif.
- 13) Rekomendasi Bukittinggi (2005), bahwa pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap anak seyogyanya dipandang sebagai :

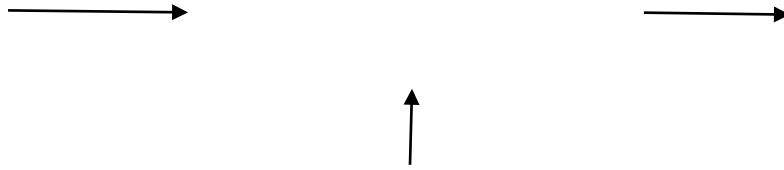
- (a) Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk *pendidikan untuk semua* adalah benar-benar untuk semua.
- (b) Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua anak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan usia dini anak prasekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusif.
- (c) Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga Negara.

F. Ruang Lingkup Program Pendidikan Inklusif

Pada dasarnya program pendidikan inklusif tidak jauh berbeda dengan program pendidikan secara umum, hanya saja ada hal-hal khusus yang menjadi pusat perhatian dalam program pendidikan inklusif, dikarenakan kebutuhan akan peserta didik ABK adalah bermacam-macam, sehingga perlakuannya harus tepat.

Ruang lingkup program pendidikan inklusif meliputi: program pengelolaan peserta didik, kurikulum, pembelajaran, tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, lingkungan (hubungan masyarakat), dan kegiatan secara diagramatis seperti berikut ini:





Gambar 1.3. Ruang Lingkup Program Pendidikan Inklusif³⁸

Komponen-komponen tersebut merupakan subsistem dalam sistem pendidikan pembelajaran. Bila terdapat perubahan pada salah satu subsistem, maka menuntut perubahan/penyesuaian komponen lainnya.³⁹ Di dalam mengelola sumber daya pada satuan pendidikan inklusif hampir tidak berbeda dengan cara mengelola sumber daya pada satuan pendidikan lainnya. Hanya saja terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yang menjadi spesifikasi dari pendidikan inklusif..

1. Program Peserta Didik

a. Program Penerimaan Peserta Didik

Penerimaan peserta didik baru pada sekolah inklusif hendaknya memberi kesempatan dan peluang kepada anak luar biasa untuk dapat diterima dan mengikuti pendidikan di sekolah inklusif terdekat. Seperti yang dikemukakan Sapon-Shevin O'Neil (1995) bahwa pendidikan inklusif sebagai suatu sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak berkelainan dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Pada tahapan pertama, supaya lebih mudah dalam pengelolaan kelas, sebaiknya setiap kelas inklusif dibatasi dengan jumlah anak berkebutuhan khusus tidak boleh lebih dari 2 (dua) jenis anak berkebutuhan khusus dan jumlah

³⁸ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 81

³⁹ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 72

keduanya tidak boleh lebih dari 5 anak. Namun demikian, tidak semua daerah memiliki sekolah yang sesuai dengan karakteristik pendidikan inklusif.⁴⁰

b. Program Asesmen peserta didik

Upaya untuk mencermati tentang kondisi anak berkebutuhan khusus, maka perlu dilaksanakan penilaian (asesmen). Ada dua jenis penilaian (asesmen) yang dapat dilaksanakan, yaitu asesmen fungsional dan asesmen klinis.⁴¹

- 1) Asesmen fungsional, dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dan hambatan peserta didik berkebutuhan khusus dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Asesmen fungsional adalah beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi *antecedents* dan *consequences* dari suatu perilaku tertentu. Asesmen ini dapat dilakukan oleh guru dan/atau guru pembimbing khusus di sekolah.
- 2) Asesmen klinis, yang dilakukan oleh tenaga profesional, guna mengetahui alat bantu visual yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus, agar dapat dimanfaatkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

c. Program Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Setelah dilaksanakan identifikasi dan asesmen, maka dapat diketahui kondisi dari anak berkebutuhan khusus, dengan menggolongkan pada:⁴²

- 1) Tunanetra;
- 2) Tuna rungu;

⁴⁰ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 82

⁴¹ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 82

⁴² Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 5

- 3) Tunagrahita;
- 4) Tunadaksa;
- 5) Tunalaras;
- 6) Anak mengalami kesulitan belajar spesifik;
- 7) Anak lamban belajar;
- 8) Anak Autis;
- 9) Anak Cerdas Istimewa;
- 10) Anak ADHD (gangguan perhatian dan hiperaktif)

Di dalam Permendiknas No. 70 Tahun 2009, dalam salah satu pasalnya menjelaskan bahwa peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, social, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.⁴³

Secara khusus dalam menentukan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus, membutuhkan identifikasi tersendiri, karena masing-masing kebutuhan dari peserta didik bagi anak berkebutuhan khusus sangatlah berbeda. Hal yang perlu diperhatikan terhadap anak berkebutuhan khusus adalah: (1) Anak-anak yang mengalami gejala kesulitan belajar spesifik, seperti kesulitan belajar menulis, kesulitan belajar membaca, dan kesulitan belajar berhitung/matematika; (2) Anak yang mengalami gejala *underschiever*; (3) Anak yang prestasi belajarnya sangat rendah; (4) Anak yang memiliki gejala

⁴³ Permendiknas No. 70, 2009, *Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau BAKat Istimewa*, h. 4

gangguan emosi dan perilaku; (5) Anak yang memiliki gejala gangguan komunikasi; (6) Anak yang memiliki gejala gangguan kesehatan dan gizi; (7) Anak yang memiliki gejala gangguan gerakan anggota tubuh; (8) Anak yang memiliki gejala gangguan penglihatan; (9) Anak yang memiliki gejala gangguan pendengaran.⁴⁴

2. Program Kurikulum Pendidikan

Kurikulum yang dipergunakan di kelas inklusif adalah kurikulum anak normal (*regular*) yang disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik. Penyesuaian dapat dilakukan pada hal-hal berikut ini.⁴⁵

- a. alokasi waktu;
- b. isi/materi;
- c. proses belajar mengajar;
- d. media, bahan, dan sarana-prasarana;
- e. lingkungan belajar;
- f. pengelolaan kelas;

Pengembangan kurikulum pendidikan khusus mengacu pada kurikulum 2013 antara lain;⁴⁶

- a. Relevansi;

Dua relevansi internal dan relevansi eksternal. Internal kebutuhan mengembangkan potensi anak dan mengatasi hambatan anak, dan eksternal berupa

⁴⁴ Budiyanto, 2017, *Pengantar Pendidikan Inklusif*, Jakarta, Prenada Media Grup, h. 132

⁴⁵ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar ...*, h. 83

⁴⁶ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar.....*, h.. 84

kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan untuk hidup di masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang.

b. Praktis dan fungsional;

Praktis maksudnya dapat dikerjakan oleh anak dengan latihan, dan fungsional dapat digunakan untuk keterampilan di daerah lingkungan keluarga (domestik), sebagai rekreasi, keterampilan di masyarakat dan keterampilan bekerja.

c. Fleksibilitas;

Dalam implementasi, setiap pencapaian kompetensi dasar dibutuhkan waktu belajar, metode, dan evaluasi yang menyesuaikan dengan situasi dan kondisi.

d. Berorientasi pada peserta didik;

Setiap penetapan kompetensi inti dan kompetensi dasar memperhatikan kebutuhan anak akan kecakapan-kecakapan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan pada implementasi berdasarkan deskripsi kondisi anak yang telah dimiliki dalam setiap aspek kecakapan.

e. Kontinuitas;

Berkesinambungan, mulai dari kecakapan inti yang paling dasar dari kehidupan awal anak sampai kemandirian dalam keluarga dan masyarakat.

f. Integratif;

Mengintegrasikan berbagai substansi dasar membaca, menulis, berhitung dan domain karakter, pengetahuan, sikap, keterampilan ke dalam penggunaan belajar aspek kecakapan aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas kehidupan sehari-hari merupakan tema yang mengikat berbagai substansi dasar dan domain-domain kepribadian anak ketika pengembangan pembelajaran.

g. Efektif dan Efisien;

Semua penggunaan sumber daya pendukung pembelajaran yang digunakan untuk mencapai kompetensi inti dan dasar dilakukan secara efisien dan efektif.

h. Program Kompensatoris;

Prinsip yang dipergunakan untuk mengatasi hambatan, sehingga senantiasa terus menerus diupayakan dalam mengatasi hambatan.

Desain kurikulum pada sekolah inklusif harus mempertimbangkan dua hal, yaitu karakteristik peserta didik dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.⁴⁷

Program kurikulum sekolah inklusif antara lain meliputi:

- a. Modifikasi kurikulum yang berlaku pada sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan ciri-ciri yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. Mengimplementasikan kalender pendidikan
- c. Mengatur jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar;
- d. Menyusun pelaksanaan penyusunan program pengajaran persemester dan persiapan pelajaran;
- e. Mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan ekstrakurikuler;
- f. Mengatur pelaksanaan penilaian;
- g. Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas;
- h. Mengatur laporan kemajuan belajar peserta didik ;
- i. Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran.

3. Program Proses Pembelajaran

⁴⁷ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar...*, h.. 108

Fakta menunjukkan bahwa dalam pendidikan inklusif terdapat *heterogenitas* peserta didik dengan latar belakang beberapa kebutuhan khusus, sehingga dalam proses pembelajaran perlu dipersiapkan sesuai kebutuhan bagi peserta didik inklusif dan peserta didik reguler. Sehingga dalam hal ini, selain menyediakan persiapan pembelajaran secara umum, diperlukan juga program pembelajaran individual (PPI).

Pada penyusunan PPI hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip anak berkebutuhan khusus, meliputi⁴⁸:

- a. Berorientasi pada peserta didik;
- b. Sesuai dengan potensi dan kebutuhan anak;
- c. Memperhatikan kecepatan belajar masing-masing;
- d. Mengejar ketertinggalan serta mengoptimalkan kemampuan anak berkebutuhan khusus;.

Adapun komponen-komponen PPI sekurang-kurangnya meliputi⁴⁹:

- a. Deskripsi tingkat kemampuan anak berkebutuhan khusus;
- b. Tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek (khusus);
- c. Rincian layanan pendidikan khusus dan layanan lain yang terkait;
- d. Seberapa besar peserta didik dapat berpartisipasi di kelas reguler;
- e. Sasaran;
- f. Kecapaian sasaran;
- g. Metode;
- h. Cara mengevaluasi

4. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

⁴⁸ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, h. 109

⁴⁹ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, h. 109

Pendidik yang terlibat dalam sekolah inklusif yaitu guru kelas/guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). GPK adalah guru yang pernah mempunyai latar belakang pendidikan khusus (pendidikan luar biasa), yaitu yang ditugaskan di sekolah inklusif. Mereka adalah petugas yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan atau memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.⁵⁰

Kebutuhan pendidik dalam sekolah inklusif meliputi :

a. Guru Kelas;

Berkedudukan di sekolah dasar yang ditetapkan berdasar kualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sekolah

b. Guru Mata Pelajaran (Bidang Studi);

Guru mata pelajaran yaitu guru yang mengajar mata pelajaran tertentu dengan kualifikasi yang ditentukan oleh sekolah.

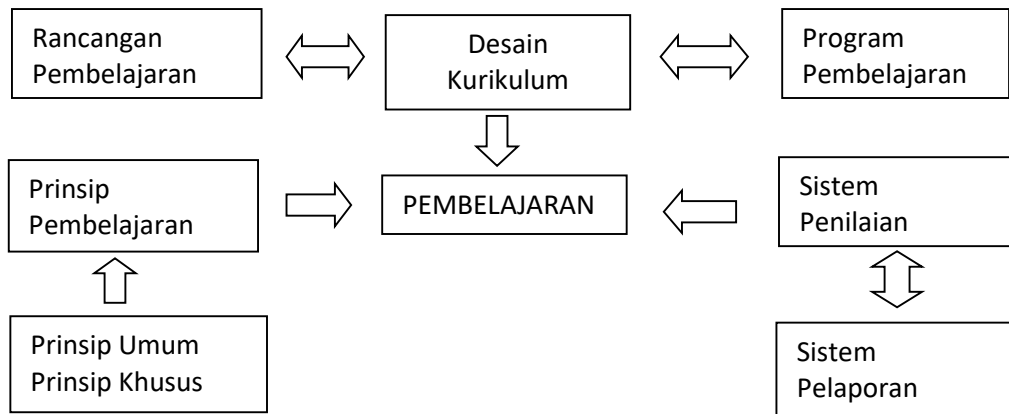
c. Guru Pembimbing Khusus (GPK);

Guru pembimbing khusus memiliki fungsi menyusun instrument asesmen pendidikan bersama guru kelas dan guru mata pelajaran, membangun sistem koordinasi antara guru kelas, pihak sekolah dan orang tua peserta didik, melaksanakan pendampingan anak berkebutuhan khusus pada kegiatan pembelajaran bersama guru kelas/guru mata pelajaran, memberi layanan khusus dan berkesinambungan dengan anak ABK serta memberikan bantuan dan berbagi pengalaman dengan anak ABK.⁵¹

⁵⁰ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar....*, h. 86

⁵¹ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar,*, h. 88

Guna memberikan gambaran dan mempermudah terhadap proses pembelajaran dalam program pendidikan inklusif, maka disajikan dalam gambar desain kurikulum pembelajaran berikut ini:



Gambar 1.4. Desain Kurikulum Pembelajaran ⁵²

5. Program Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana prasarana dalam pendidikan inklusif sama dengan sekolah pada umumnya, hanya saja ada peralatan khusus yang harus disediakan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, misalkan untuk anak yang mengalami kesulitan penglihatan harus disediakan *Snellen Chart*, *Ishihara Test* untuk menentukan buta warna, *Trial Lens Set* serta *Snellen Chart Electroni*. Selain itu bagi tuna netra harus disediakan peta timbul, abacus, penggaris Braille, *reglet* dan *stylus*-nya serta papan baca barille. Sementara itu untuk anak kesulitan dalam pendengaran, harus disediakan *hearing head*. Selain itu yang lebih penting lagi dalam assesmen perlu dipersiapkan *scan list*, alat-alat bunyi, garpu tala, audiometer, blank audiogram, *mobile sound proof* dan *sound level meter*.⁵³

⁵² Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, ..., h. 136

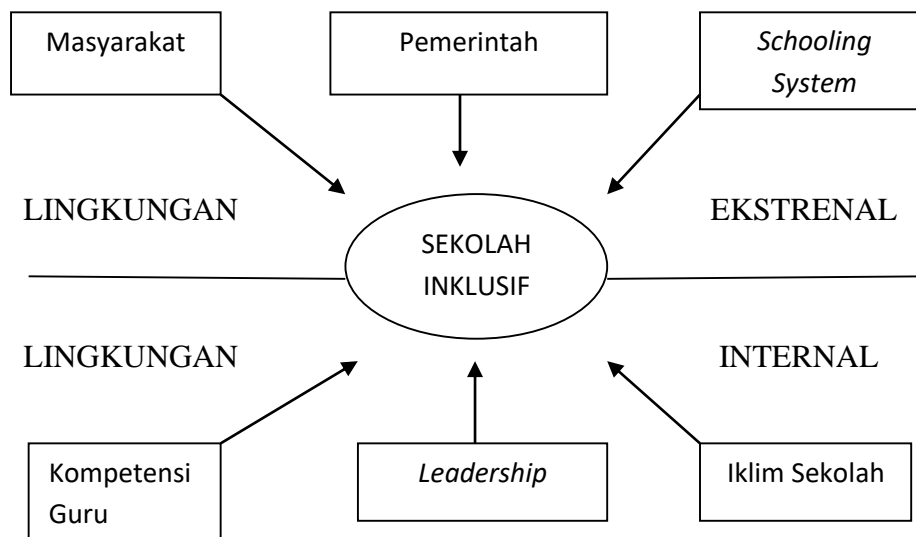
⁵³ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar* ..., h. 91

6. Program Sistem Dukungan Sekolah Inklusif

Sistem dukungan sekolah inklusif meliputi: sistem dukungan internal sekolah yang terdiri dari: kepemimpinan kepala sekolah, kompetensi guru, dan iklim sekolah. Sementara itu, sistem dukungan eksternal sekolah meliputi pemerintah dan masyarakat.⁵⁴

Sistem dukungan tersebut harus bersinergis dan saling terkait, sehingga pendidikan inklusif dapat terlaksana dengan baik, dapat memenuhi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan anak reguler. Tanpa adanya keterkaitan antar sistem tersebut, maka kegiatan pembelajaran di dalam sekolah inklusif tidak akan maksimal.

Pada dasarnya pendidikan inklusif menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. Ketiga komponen tersebut sangat menentukan bagi terlaksananya pendidikan inklusif dan memiliki peran yang sangat penting. Keterkaitan antara ketiga komponen tersebut, apabila digambarkan, akan tersaji dalam gambar berikut ini:



⁵⁴ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar*, h. 138

Gambar 1.5. Sistem Hubungan Masyarakat Sekolah Inklusif⁵⁵

⁵⁵ Dadang Garnida, 2015, *Pengantar.....* h. 148